Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi
Volume 1 - No. 1, April 2014

**PENGARUH PENERAPAN *e-REGISTRATION*, *e-SPT* DAN *e-PAYMENT*
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN (PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PADANG)**

Dewi Zulvia
STIE "KBP" Padang
(dewizulvia@gmail.com)

ABSTRACT

In preparing this essay, the author has conducted research on the Tax Office Primary Padang with data collection conducted through questionnaires distributed to taxpayers in the Padang Primary Tax Office of the 100 taxpayers. Data analysis in this study using multiple linear regression analysis, test and test t. Tujuan of this study was to determine the effect of e-Registration, e-SPT and e-Payment Compliance Rate Taxpayers Against either simultaneously or partial.

The results can be concluded that the partial e-Registration (X1) significantly affects the Taxpayer Compliance Rate visible from sig <0.05 and Due tcount> ttable (4.223> 2.000). In an e-SPT (X2) significantly affects the Taxpayer Compliance Rate visible from sig <0.05 and tcount> ttable (5.195> 2.000). And e-Payment (X3), no significant effect on Taxpayer Compliance Rate visible from sig <0.05 and t count <ttable (-251 <2.000), while simultaneously e-Registration (X1), e-SPT (X2) and e-Payment (X3) has a significant influence on the Taxpayer Compliance Rate (Y) seen from the level of significant F of 0.000 (sig F = 0.000) and F count> F table Ftable (18.190> 2.72).

Finally, the authors suggested that the tax authorities (tax authorities) on the Tax Office Primary Padang need to improve the quality of service because there is still tax payers between the services provided by service that is expected, how this can be achieved is by improving the quality of human resources, especially human resources more directly related with taxpayers.

Keywords: *e-Registration, e-SPT, e- payment, kepatuhan wajib pajak*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak dan Kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai

peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri, Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih di utamakan dari pada luar negeri dan peningkatan dana dalam negeri, pajak merupakan alternatif yang sangat potensial.

Sebagaimana yang kita ketahui sumber penerimaan Negara yang terbesar berasal dari pajak yang akan

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Apalagi di era globalisasi persaingan di berbagai bidang sangat ketat, khususnya dalam bidang ekonomi. Perkembangan yang pesat dalam teknologi di berbagai sektor juga membawa dampak kepada perkembangan di dunia usaha. Serta pemungutan pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat.

Masyarakat dunia secara umum mengalami perubahan pola perilaku dan kebutuhan yang dikarenakan perkembangan teknologi dan arus informasi. Hal ini sejalan dengan terus berkembangnya dunia telekomunikasi "*e-Commerce*" yang mengemas teknologi dan informasi ke komunitas dunia. Dengan membawa kedua hal tersebut konsumen menjadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen lebih bertingkah laku praktis dalam arti konsumen membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dan internet menjadi salah satu media yang murah, cepat dan memiliki jangkauan yang luas hingga menembus batas-batas negara. Seiring dengan *booming* internet pada akhir 90-an. Bermunculanlah berbagai *online shop* yang menawarkan produk melalui *website* yang dirancang untuk dapat melakukan transaksi secara *online*, dan lahirlah istilah *e-Commerce*.

Hal ini bisa dilihat dari kegiatan usaha melalui *e-Commerce*, sebagai hasil dari kemajuan di sektor komunikasi dan teknologi informasi. Seperti diketahui Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum disahkan sehingga praktis kegiatan usaha di sektor ini masih tanpa payung hukum. Hal yang sama juga berlaku

dari sudut pandang Undang-undang Pajak Penghasilan.

Disamping pembentukan dan penerapan sistem modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan dan mengedepankan pelayanan ini terlihat dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan, dan Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan yang dapat memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri melalui *e-registration*, pembayaran pajak (*e-payment*), pelaporan pajak (*e-SPT*), saat ini sudah dapat dilaksanakan melalui internet.

Dengan *self assessment system*, diberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Kemudian membayar sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, perlu juga dimaklumi. Sebaik apapun kondisi perpajakan yang diterapkan suatu negara. Atau, setinggi apapun tingkat kesadaran masyarakatnya, fungsi pengawasan tetap harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik otoritas pemungut pajak. Jika tidak, maka tidak ada kontrol untuk menilai, apakah pembayaran pajak oleh masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

Fenomena yang terjadi hingga saat ini yaitu, kepatuhan Wajib Pajak cenderung rendah karena kurang puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sebaiknya pemerintah tidak hanya menggalakkan penagihan, akan tetapi perlu diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan.

Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mendapatkan layanan yang cepat, bersih, dan memuaskan. Pelayanan kepada Wajib Pajak

merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan pemungutan pajak di setiap negara, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

Oleh karena itu, pelayanan kepada Wajib Pajak merupakan suatu upaya awal yang perlu dilakukan oleh DJP melalui Aparat di KPP untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak atas hak dan kewajibannya termasuk didalamnya dalam melaporkan pajaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan modernisasi pajak, pelayanan KPP diharapkan menjadi lebih baik dengan lebih mengutamakan pelayanan prima yang didukung pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak.

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:1) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani yang dikutip oleh Erick Suwarta (2003:3) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik langsung yang dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH

adalah sebagai berikut : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih terdapat sisa (*surplus*), maka surplus tersebut dapat digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment”.

Asas pemungutan pajak (Masyahrul, Tony, 2005) (a). Asas Tempat Tinggal Negara- negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan). (b). Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. (c). Asas Sumber Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Mardiasmo (2006:1) Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di dalam hukum pajak diatur mengenai : (1) Siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak (2) Objek apa saja yang menjadi objek pajak (3) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah (4) Timbul dan hapusnya

utang pajak (5) Cara penagihan pajak (6) Cara mengajukan keberatan dan banding

Mardiasmo (2006:6) tata cara pemungutan pajak adalah: (1) Stesel pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel : (a) Stelsel Nyata (riil stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan nya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). (b) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan nya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagai mana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan nya. Berdasar kan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif

Menuju *good governance* melalui modernisasi pajak sesuai dengan perkembangan kondisi dan dunia usaha yang selalu berubah, Direktorat Jendral pajak (DJP) merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Struktur organisasinya dengan melakukan modernisasi administrasi Perpajakan salah satunya dengan menerapkan system teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan seperti *e-registration*, *e-spt*, dan *e-payment*.

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau e-Registration) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan

oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak adalah: (1) Wajib Pajak dan/atau PKP dapat melakukan perubahan data melalui Sistem e-Registration. (2) Permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak dan / atau PKP pada Sistem e-Registration. Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1(satu) hari kerja sejak informasi perubahan data melalui Sistem e-Registration diterima KPP, sepanjang permohonan perubahan data diisi secara lengkap.

Dokumen yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan dalam aplikasi e-Registration antara lain sebagai berikut: (1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan /tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing Untuk Wajib Pajak Badan: (a) Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap (b) NPWP Pimpinan/Penanggu Jawab Badan (c) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggu jawab. (1) Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong. surat

penunjuk an sebagai Bendahara, Kartu Tanda Penduduk Bendahara. Untuk Joint Operation (JO) sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong: (a) Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai JO (b) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggu jawab; NPWP Pimpinan/Penanggu Jawab JO. Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan sebenarnya, tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor). Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan hardcopy dokumen ke KPP terkait.

Untuk memberikan pelayanan prima, aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan daripada aplikasi sebelumnya. Pertama, ia dibuat sesuai dengan kebutuhan WP. Berbeda dari aplikasi e-SPT sebelumnya yang harus diinstal untuk semua jenis pajak, aplikasi e-SPT terbaru diinstal secara terpisah. Artinya, wajib pajak cukup menggunakan aplikasi sesuai dengan jenis kewajiban PPh-nya. Meski tiap jenis pajak terpisah, menu maupun tampilan e-SPT tetap sama. Hal ini agar membuat para pengguna makin *familiar* dengan aplikasi ini. *Kedua*, wajib pajak tak perlu repot membuang aplikasi yang terlanjur terinstal lantas menginstal lagi aplikasi terbaru jika ada perubahan ketentuan dan peraturan terkait. Hal ini karena aplikasi ini menerapkan sistem tambalan (*patching*). Untuk *update* aplikasi terbaru pada masa yang akan datang, wajib pajak cukup meng-klik "*patch*".

e-SPT yang baru lebih gampang dioperasikan daripada aplikasi sebelumnya. Berikut beberapa kiat menjalankan aplikasi tersebut dengan baik. (1) Terdapat perbedaan cara

instalasi aplikasi antara program Windows XP dan Windows Vista. Pemakai Windows XP tinggal melakukan *double-click* untuk menginstalnya sedangkan pengguna Windows Vista perlu menjalankan “klik kanan” dan memilih menu “Run as Administrator”. (2) Tak perlu membuang aplikasi e-SPT lama karena aplikasi yang baru tidak menimpa program yang lama. Selain itu, data pada aplikasi lama diperlukan untuk melakukan pembetulan SPT Masa yang bersangkutan. (3) File skema impor tersedia dalam bentuk Microsoft Excel (.xls). Berkas ini untuk memudahkan WP yang melakukan banyak transaksi dalam satu masa pajak. Simpanlah data skema impor tersebut dalam bentuk *comma delimited* (.csv). (4) Pastikan bahwa setiap *cell* pada berkas skema impor terformat “General”. Jangan mengubah format *cells* dalam bentuk lainnya semisal “Number”, “Accounting”, bahkan “Text”. (5) Dalam membuat berkas SPT (*create file*), terdapat perbedaan cara antara program Windows XP dan Windows Vista. Windows XP secara otomatis membuat lokasi penyimpanan berkas. Pengguna Windows Vista perlu membikin *folder* terlebih dahulu untuk menyimpan *file* yang akan dibuat. (6) Simpanlah berkas di dalam komputer (*drive*) terlebih dahulu, baru digandakan ke dalam disket, keping kompak (CD), atau *flashdisk* dalam rangka pelaporan. (7) Jangan mengubah (*rename*) berkas yang telah berhasil dibuat. Jangan pula membuka berkas tersebut (*open file*) karena akan merusak berkas pada saat pelaporan SPT kepada KPP terkait. (8) Cetaklah SPT induk yang sudah berhasil dibuat dan bawalah *file* tersebut (.csv) untuk dilaporkan kepada KPP yang bersangkutan.

Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak: (1) Membuka situs Direktorat

Jenderal Pajak dengan alamat (2) Memilih menu sistem e-Registration. (3) Membuat account dengan melakukan login pada sistem e-Registration. (4) Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. (5) Memilih menu “Permohonan Pendaftaran NPWP dan / atau Pengukuhan PKP (6) Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendahara) (7) Mengisi formulir permohonan pada layar komputer dengan lengkap dan benar. (8) Memilih tombol “daftar” untuk mengirim Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP. (9) Mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS melalui aplikasi e-Registration. (10) Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar.

Pengertian e-SPT PPN yaitu software yang dibuat untuk mempermudah dalam pelaporan SPT PPN dengan cara memasukkan data - data kedalam software tersebut dan melaporkannya dalam bentuk CD dan dapat juga meminimalisasi kesalahan dalam pelaporan SPT PPN. e-Payment adalah pembayaran elektronik melalui sms, atau online service seperti internet online banking.

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan nya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban nya. Hal ini terkait dengan ikhwil kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisi kan sebagai suatu

keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Supadmi (2006) yang berjudul "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan" bahwa Self assessment sistem perpajakan Indonesia tuntutan tinggi pajak tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan melalui pemberian kualitas pelayanan yang lebih baik oleh kantor pajak, yang meliputi keamanan, kenyamanan, dan cepatlayanan, serta penegakan hukum. Pembayar pajak tingkat kepatuhan dapat diukur dengan memeriksa apakah mereka memahami undang-undang per-pajakan, isi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung kewajiban pajak dengan benar, dan pajak tangguhan laporan tepat waktu.

Dari kerangka pikir dan uraian diatas maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut:

- H1 : Diduga adanya pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- H2 : Diduga adanya pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- H3 : Diduga adanya pengaruh penerapan *e-Payment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- H4 : Diduga adanya pengaruh penerapan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Payment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara simultan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi, maka dalam penentuan sample penelitian ini digunakan rumus Slovin dalam Umar (2004:108) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau

pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

5 = SangatSetuju

3 = Setuju

3 = Ragu-ragu

2 = TidakSetuju

1 = SangatTidakSetuju

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua (*split-half*) dari Sperman-Brown rumusnya sebagai berikut:

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 + r_b}$$

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen. Uji statistik F juga digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah *fixed* atau belum, dengan ketentuan jika $p \text{ value} > (\alpha) = 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ table}$ model tersebut sudah *fixed* dan bias digunakan untuk enguji hipotesis. Nilai F statistic dari formula sebagai berikut : (Irianto, 2004 : 207)

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. Statistic t dihitung dari formula sebagai berikut : (Irianto, 2004 : 204)

$$t_k = \frac{b_k}{S_{b_k}}$$

Data dan Sampel

populasi diartikan sebagai keseluruhan subyek penelitian” (Suharmi Arikunto, 2006: 130). Dari

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sebagai keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang akan diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Untuk populasi dengan banyak elemen, pengukuran karakter populasi dilakukan melalui sejumlah elemen yang dipilih dari populasi tersebut dengan suatu metode tertentu. Cara pengambilan sejumlah elemen dari populasi ini disebut dengan sampling, dan elemen yang dipilih melalui cara ini disebut sebagai sampel (sample)Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang menggunakan e-Registration, e-Spt, e-Payment. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang menggunakan e-Registration, e-Spt, e-Payment pada tahun 2009 adalah sebanyak 16.570 orang. (Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang berjumlah 100 wajib pajak. Analisa data ini digunakan untuk mengetahui jumlah persentase karakteristik demografi responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 73 orang atau 73%. Sedangkan 27 orang atau 27% sisanya adalah wajib pajak pria, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki lama kerja < 5 tahun yaitu sebanyak 62 orang atau 62%, sedangkan responden yang memiliki lama kerja 5-10 tahun sebanyak 31 orang atau 31% dan terendah responden yang memiliki lama kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak

7 orang atau 7%. Dan tingkat pendidikan responden terbanyak mempunyai tingkat pendidikan S-1 yaitu sebanyak 42 orang atau 42%, 37 orang atau 37% responden berpendidikan D-3, 7 orang atau 7% responden berpendidikan D-1, 7 orang atau 7% responden berpendidikan SLTA dan sederajat dan 7 orang atau 7% responden berpendidikan S-2.

Validitas berarti dapat diterima dan tidak diragukan (sah). Istilah ini mengandung pengertian bahwa yang dinyatakan valid berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan, sehingga dapat diterima dalam kinerja tertentu. Analisa pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Product Moment Pearson's Correlation* dengan bantuan SPSS 15,0 for windows semua butir pertanyaan dalam kuesioner ini dinyatakan valid. Definisi valid tersebut karena keseluruhan butir pertanyaan memiliki nilai korelasi dengan signifikansi nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,195) pada taraf signifikansi 5%.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika, jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* atau diukur sekali saja. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran yang hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain.

Uji statistic *Cronbach alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *Cronbach alpha* > 0,6. variabel x_3 dalam kuesioner penelitian adalah reliable karena nilai pada *cronbach alpha* > 0,6. Sedangkan variable x_1 , x_2 dan y dalam kuesioner tidak reliable karena nilai pada *cronbach alpha* < 0,6.

e-Registration atau pendaftaran wajib pajak yang didaftarkan melalui internet tidak dapat diandalkan hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menggunakan elektronik khususnya internet. e-SPT atau pelaporan wajib pajak melalui internet tidak dapat diandalkan hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pengisian SPT dan dalam menggunakan elektronik khususnya internet. e-Payment realibel atau handal karna banyaknya wajib pajak yang melakukan pembayaran secara elektronik dan wajib pajak dengan cepat mengetahui atas pembayaran yang telah sukses karena adanya sms banking. Pada output bagian *Coefficient Correlations* terlihat bahwa dari tiga variabel independen angka VIF berada dibawah angka 5. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas. e-Registration, e-SPT dan e-Payment yang dilakukan melalui internet merupakan persamaan regresi berganda yang baik karena persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel independen yang tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya.

Kebebasan data disini berarti data untuk satu periode tertentu tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya dan model regresi yang baik harus bebas dari autokorelasi. Ini dapat dilihat dari angka D-W (Durbin Watson) sebesar 1,681 yang berada diantara -2 sampai dengan +2 (salah satu patokan umum dalam menentukan besaran (D-W) yang berarti model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

$$Y = 5,037 + 0,344X_1 + 0,555X_2 - 0,229X_3$$

Dari tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut yang dapat dijelaskan untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: (1) Untuk variabel keahlian kostanta

sebesar 5,037 dengan tanda positif yang berarti nilai diatas adalah nilai kepatuhan wajib pajak dan nilai tersebut akan tetap baik dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Payment*. (2) Koefisien R sebesar 0,602 atau 60,2% ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah kuat. Definisi kuat karena angka tersebut diatas 0,05 (3) Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) bertujuan untuk menunjukkan persentase tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Semakin besar R², maka semakin besar variasi dari variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi juga digunakan untuk mengetahui proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R² sebesar 0,342 atau 34,2% berarti variasi atau naik turunnya *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Payment*. Sedangkan 65,8% (sisanya (100-34,2) dipengaruhi oleh variabel lain. (4) Untuk nilai koefisien sebesar 0,344 dengan tanda positif yang berarti bahwa *e-Registration* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau dapat diartikan pula setiap pertambahan nilai *e-Registration* akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak. (5) Untuk nilai koefisien sebesar 0,555 dengan tanda positif yang berarti bahwa *e-SPT* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau dapat diartikan pula setiap pertambahan nilai *e-SPT* akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak (6) Nilai koefisien sebesar -0,229 dengan tanda negative yang berarti bahwa *e-Payment* yang telah dilakukan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak atau dapat diartikan pula setiap penurunan *e-Payment* akan mengurangi nilai kepatuhan wajib pajak.

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi dari model regresi yang digunakan dengan taraf signifikansi (α) = 5%. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai f sebesar 18,190. Artinya model regresi tentang pengaruh penerapan *e-registration*, *e-spt* dan *e-payment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sudah fit atau cocok. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Payment*

H₀: *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Payment* secara statistik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Payment* secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

bahwa variabel *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Payment* memiliki nilai $f_{hitung} = 18,190$ dengan nilai $p=0,000$, sedangkan f_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah $= 2,72$. Dikarenakan $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($18,190 > 2,72$) dengan $p < 0,000$, maka H₁ diterima. Artinya *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Payment* secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t dapat menunjukkan bahwa variabel *e-Registration* memiliki nilai $t_{hitung} = 3,153$ dengan nilai $p=0,002$, sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah $= 2,000$. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,223 > 2,000$) dengan $p < 0,05$, maka H₁ diterima. Artinya *e-Registration* secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t dapat menunjukkan bahwa variabel *e-SPT* memiliki nilai $t_{hitung} = 5,195$ dengan nilai $p=0,000$, sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi

5% adalah = 2,000. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,195 > 2,000) dengan $p < 0,05$, maka H_1 diterima. Artinya *e-SPT* secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t dapat menunjukkan bahwa variabel *e-Payment* memiliki nilai $t_{hitung} = -251$ dengan nilai $p = 0,006$, sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah = 2,000. Dikarenakan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-251 < 2,000) dengan $p < 0,05$, maka H_1 ditolak. Artinya *e-Payment* secara statistik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Hasil uji t dapat menunjukkan bahwa variabel *e-Registration* secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (b) Hasil uji t dapat menunjukkan bahwa variabel *e-SPT* secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (c) Hasil uji t dapat menunjukkan bahwa variabel *e-Payment* secara statistik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (d) Hasil uji F dapat menunjukkan bahwa variabel *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Payment* secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Nazir, Moh. Ph. D. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2006. Yogyakarta : Andi Offset.

Kurniawan, Albert SE,. 2009. *Belajar Mudah Belajar SPSS untuk Pemula*.

Masyahrul, Tony. "Pengantar Perpajakan", Cetakan Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2005

Nurmantu, Safri, Drs., Msi. "Pengantar Perpajakan". Jakarta, Kelompok Yayasan Obor, 2003.

Santoso, Singgih. "Buku Latihan SPSS Statistik Nonparametrik", Cetakan Ketiga, PT Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2004

Brotodihardjo, R., Santoso, S., H. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2003

Uandy, Erly. "Perpajakan" Edisi Kedua, Salemba Empat, 2006

Sugiyono. "Statistik Untuk Penelitian", Bandung, Alfabeta, 2007

Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1992. *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992.